



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 18 Januari 2021.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 2. Membahas Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 44 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas **“Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan Isu-isu Aktual”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2020 sebesar Rp67.796.736.807.669 (*enam puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau 96,07% dari total anggaran sebesar Rp70.569.369.214.000,- (*tujuh puluh triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah*), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	APBN 2020	Realisasi	%
1	Inspektorat Jenderal	135.213.119.000	133.932.403.883	99,05
2	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	132.737.867.000	130.922.677.085	98,63
3	Sekretariat Jenderal	1.934.744.602.000	1.887.290.037.768	97,55
4	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.570.128.422.000	5.428.069.069.998	97,45
5	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	478.597.220.000	465.625.970.900	97,29
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	239.567.545.000	232.442.299.845	97,03
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.747.440.937.000	1.694.458.453.071	96,97
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	706.064.290.000	681.203.716.520	96,48

No	Unit Eselon I	APBN 2020	Realisasi	%
9	Ditjen Pendidikan Islam	57.365.684.150.000	55.139.162.388.970	96,12
10	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	849.175.849.000	809.012.822.074	95,27
11	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.410.015.213.000	1.194.616.967.555	84,72
	Jumlah	70.569.369.214.000	67.796.736.807.669	96,07

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai realisasi anggaran di tiap Unit Kerja bersama Pejabat Eselon I.

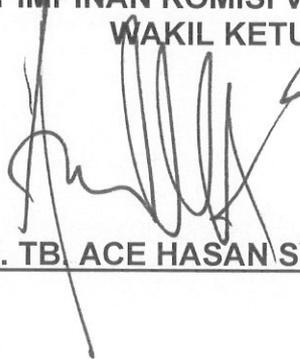
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar serapan anggaran pada tahun 2021 lebih optimal.
 - b. Menyampaikan data pendukung mengenai realisasi anggaran Covid-19 tahun 2020 pada Ditjen Pendidikan Islam yang realisasinya terendah, yaitu sebesar 80.32%.
 - c. Menyampaikan data pendukung terperinci mengenai realisasi anggaran pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama terkait dengan kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji.
 - d. Menyampaikan data pendukung mengenai realisasi anggaran Belanja Pegawai yang melebihi pagu anggaran atau sebesar 100.44%.
 - e. Meningkatkan peran penyuluh agama di tengah masyarakat untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program Kementerian Agama RI.
 - f. Mendukung penambahan kuota untuk formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 dalam memenuhi kebutuhan guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - g. Mendukung penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah bagi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - h. Mengalokasikan anggaran bantuan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi madrasah swasta di tahun 2021.

3. Komisi VIII DPR RI mendorong adanya pembicaraan lebih lanjut antara Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membahas anggaran pendidikan yang berkeadilan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.37 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name below.

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.